EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah terhadap Kemiskinan di Karesidenan Surabaya Tahun 2015-2020

Nurul Pratiwi[1*] dan Eni Setyowati[2]
[1,2*] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102
*e-mail: nurulpratiwi0911@gmail.com

Artikel Info

Received :
18 April 2022
Revised :
28 October 2022
Accepted :
07 November 2022

Kata Kunci :
Kemiskinan, Pengangguran, IPM, Upah

Keywords :
Poverty, Unemployment, HDI, Wage

ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional, sehingga diperlukan solusi atau perencanaan untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi arah dan besarnya pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah terhadap kemiskinan di Karesidenan Surabaya tahun 2015-2020 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menggunakan pendekatan *Random Effects* menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan sedangkan IPM bepengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel upah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Analysis of The Effect of Unemployment, Human Development Index and Wage on Poverty in Surabaya Residency in 2015-2020

ABSTRACT

Poverty is the one of the problems in a complex and multidimensional economy, so the solution is to reduce the level of poverty. This study aims to estimate the influence of the unemployment, human development index (HDI) and wages on poverty in Surabaya Residency in 2015-2020 used panel data regression. The results of this selected research using Random Effect (REM) approach, show that the unemployment variable has a positive effect on poverty while the HDI has a negative effect on poverty. Meanwhile, wage variable has no effect on poverty.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

PENDAHULUAN

Kemiskinan sentiasa menjadi masalah yang kompleks yang sering terjadi di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat. Adapun, pengertian kemiskinan selaku ketidakmampuan individual dalam melengkapi urgensi dasar guna meningkatkan kehidupan yang lebih baik yang merupakan suatu keadaan yang berada digaris nilai standar kebutuhan minimum dalam bentuk makanan ataupun barangan yang disebut batas kemiskinan *(poverty treshold)* (Ferezagia, 2018).

Problema kemiskinan sering menjadi perhatian utama khususnya di negara-negara yang tengah berkembang karena kemiskinan ialah problematika sosial yang memberi dampak negatif dan mengganggu kehidupan masyarakat untuk meneruskan kehidupan. Dari masalah kemiskinan dapat terjadinya kriminal dilingkungan masyarakat seperti pencurian. Selain itu, tingkat pengangguran akan semakin meningkat dan dapat menjejaskan kesehatan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok harian dan melanjutkan pendidikan yang lebih baik (Annur, 2013).

Menurut World Bank, terdapat empat ciri penduduk miskin yaitu: komunitas, area, rumah tangga serta perseorangan. Faktor komunitas, infrastruktur menjadi penentu utama terjadinya kemiskinan, kondisi infrastruktur mempunyai hubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika kemudahan infrastruktur diberi dalam keadaan baik maka akan sangat mempermudah masyarakat guna beraktivitas baik ekonomi ataupun sosial. Faktor komunitas dapat dijadikan sebagai akses terhadap pekerjaan seperti industri dan lembaga keuangan (Pratama, 2019).

Banyak faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan misalkan pengangguran, indeks pembangunan manusia serta upah mempunyai hubungan yang saling terkait yang menjadi penyebab masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu penyebab yang memengaruhi kemiskinan ialah pengangguran. Ciri yang dapat mendasari kesejahteraan ialah besaran pendapatan, tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah menggambarkan rendahnya pendapatan seseorang sehingga sulitnya untuk mengonsumsi barang ataupun jasa yang menyukarkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan dan menyebabkan kemiskinan terus menerus (Putri et al., 2019).

Provinsi Jawa Timur ialah satu diantara sejumah provinsi berjumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jawa Timur ialah wilayah yang memiliki beberapa Karesidenan yaitu Karesidenan Surabaya, Karesidenan Madiun, Karesidenan Bojonegoro, Karesidenan Kediri, Karesidenan Malang, Karesidenan Besuki dan Karesidenan Madura.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Karesidenan Surabaya Tahun 2015-2020

Kabupaten	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Surabaya	5,82	5,63	5,39	4,88	4,51	5,02
Sidoarjo	6,44	6,39	6,23	5,69	5,32	5,59
Mojokerto	10,57	10,61	10,19	10,08	9,75	10,57
Jombang	10,79	10,70	10,48	9,56	9,22	9,94
Gresik	13,63	13,91	12,80	11,89	11,35	12,40
Lamongan	15,38	14,89	14,42	13,80	13,21	13,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), (2022).

Tabel 1 menunjukan bahwasanya selama periode 2015-2020, persentase kemiskinan di Karesidenan Surabaya mengalami fluktuasi setiap tahun. Persentase penduduk miskin di

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

Kabupaten Lamongan adalah yang paling tinggi diantara kabupaten lainnya sebesar 15,38% sehingga di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 13,21% dan mengalami peningkatan penduduk miskin di tahun 2020 menjadi 13,85%. Sementara di Kabupaten Surabaya persentase penduduk miskinnya adalah yang terendah yaitu di tahun 2015 sebesar 5,82% dan mengalami penurunan sebesar 4,51% di tahun 2019 serta naik pada tahun 2020 senilai 0,51% menjadi 5,02%.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan sangatlah serius untuk mengurangi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Solusi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan adalah bentuk kebijakan pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menyediakan program-program untuk meminimalisir kemiskinan di kalangan masyarakat misalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Perdesaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menurunkan jumlah penduduk miskin (Fahmi et al., 2018).

Didasari problematika yang melatarbelakangi di atas, penulis berkeinginan melaksanakan penelitian untuk mengetahui faktor kemiskinan dengan menggunakan tahun penelitian yang terbaru di Karesidenan Surabaya. Penelitiannya dilaksanakan guna mengenali pengaruh antara variabel yang telah diuraikan di atas seperti pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) serta upah terhadap kemiskinan pada Karesidenan Surabaya tahun 2015-2020.

KAJIAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan ialah problematika dalam perekonomian yang hampir dialami semua negara global. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu guna memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Kemiskinan mampu ditetapkan kepada 2 aspek, yakni aspek primer serta aspek sekunder. Aspek primer ialah miskin aset, organisasi sosial politik, wawasan, serta keahlian. Aspek sekunder ialah miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan serta informasi (Rahman & Alamsyah, 2019).

Badan Pusat Statistik (2020), memaknai kemiskinan sebagai acuan hidup yang minim, yakni eksistensi sebuah tingkat kekurangan materi dibanding standar kehidupan yang lazim berlaku dalam masyarakat terkair. Kemiskinan mampu terjadi sebab anggota masyarakat tiada ataupun belum ikut serta dalam aktivitas perubahan sebab ketidakmampuan perihal kepemilikan faktor produksi ataupun minimnya kualitas.

Kemiskinan pula dikatakan bagaikan pola problematika ekspansial sebab eksistensi efek buruk pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang sehingga memperlambar kesenjagan pendapatan antar masyarakat ataupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). Abilitas pendapatan yang minim pun bakal berefek perihal kemerosotan abilitas pemenuhan standar hidup rata-rata misalkan standar kesehatan masyarakat serta standar pendidikan (Ningrum, 2017).

Bednar & Reames (2020) menyebutkan kemiskinan bukanlah satu keadaan kurangnya suatu komoditi maupun isu kepuasan dari komoditi tersebut tapi kemiskinan cenderung sebagai keadaan masyarakat yang kurang mampu mengoptimalkan fungsi serta memberdayagunakan komoditi terkait. Kemiskinan dibedakan kepada 4 bentuk, yakni (Todaro & Smith, 2003):

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

1. Kemiskinan Absolut
   Keadaan di mana individu berpendapatan di bawah garis kemiskinan ataupun tak mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, serta pendidikan yang diperlukan supaya mampu hidup serta bekerja.
2. Kemiskinan Relatif
   Keadaan miskin sebab pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua masyarakat di beberapa wilayah, sehingga menjadikan ketimpangan akan pendapatan.
3. Kemiskinan Kultural
   Kondisi yang mengarah kepada perihal sikap individu ataupun masyarakat sebab faktor budaya, misalkan ketidakmauan berupaya membenahi tingkat kehidupan, malas, pemboros, tak kreatif walaupun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural
   Keadaan miskin sebab minimnya akses sumber daya yang terjadi pada satu sistem sosial budaya serta sosial politik yang tak menyokong pembebasan kemiskinan, namun senantiasa meningkatkan kemiskinan.

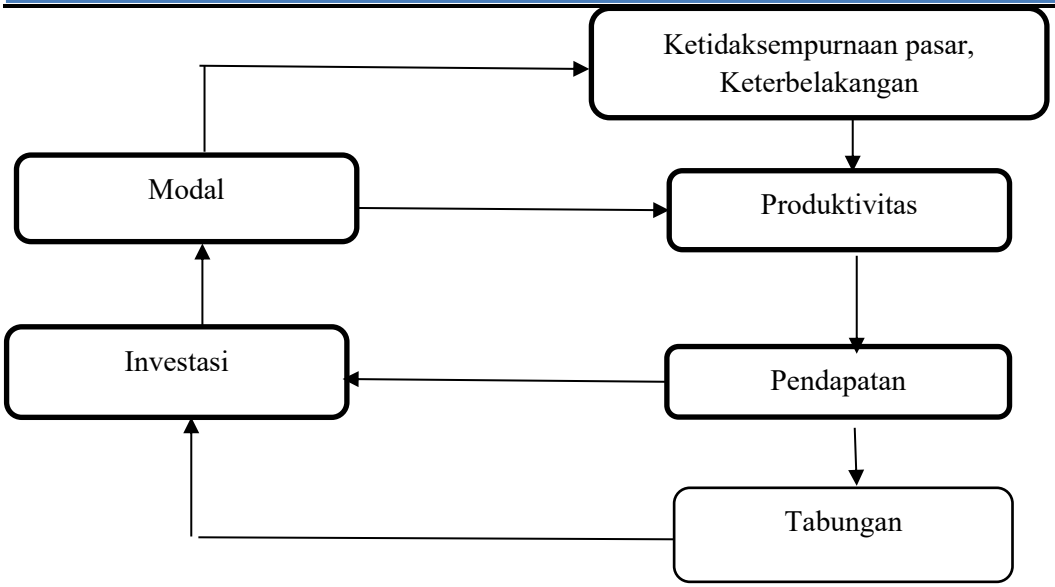
Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Lingkaran kemiskinan merupakan suatu lingkaran atau rangkaian yang saling memengaruhi satu sama lain hingga memunculkan sebuah situasi di mana suatu negara senantiasa miskin serta banyak menghadapi kesulitan guna menggapai pembangunan yang lebih baik. Terdapat 2lingkaran perangkap kemiskinan, yakni dari segi penawaran (*supply*) di mana rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas dan berdampak pada turunnya kemampuan masyarakat untuk menabung (Didu & Fauzi, 2016).

Rendahnya abilitas supaya menabung dapat menjadikan tingkat pembentukan modal yang minim, tingkat pembentukan modal atau invetasi yang rendah menjadikan kurangnya modal. Sementara itu, dari aspek permintaan (*demand*) pada sejumlah negara miskin penstimulus guna mananamkan modal yakni begitu rendah sebab ekspansi pasar teruntuk sejumlah jenis barang yang eksistensinya terbatas, perihal terkait dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat (Suradi, 2007).

Pendapatan masyarakat begitu rendah sebab rendahnya tingkat produktivitas. Produktivitas yang rendah menjadikan pendapatan masyarakat merosot sehingga teruntuk tabungan serta investasi berkurang. Menurunnya investasi akibat rendahnya modal. Rendahnya modal bakal menjadikan ketidaksempurnaan pasar serta eksistensi keterbelakangan. Perihal tersebut terus bergerak melingkar hingga tak mempunyai penghujung serta pangkal. Yang berdasarkan skema lingkaran kemiskinan pada Gambar 1.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan (Taufiq, 2017).

Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan di Indonesia memakai konseptual abilitas memenuhi kebutuhan dasar. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dikatakan layaknya ketidakmampuan dari aspek ekonomi guna mencukupi kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang dikatakan dari aspek pengeluaran. Penduduk Miskin ialah penduduk dengan rerata pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan ialah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) serta garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk dengan rerata pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin. GKM ialah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang diselaraskan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimal teruntuk papan, sandang, pendidikan serta kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2021).

$$GK = GKM + GKNM \quad .....(1)$$

di mana:
GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Pengangguran

Badan Pusat Statistik (2021), pengangguran ialah situasi kala individu tergolongan angkatan kerja dan yang menginginkan pekerjaan tetapi belum memperoleh tersebut. Pengangguran mampu memengaruhi kemiskinan dengan sejumlah cara, yaitu jikalau rumah tangga terkait mempunyai batas likuiditas yang bermakna bahwasanya konsumsi sekarang begitu di pengaruhi oleh pendapatan sekarang pula, makanya pengangguran bakal secara langsung memengaruhi kemiskinan baik yang diperkirakan dari aspek pendapatan (*income poverty rate*) ataupun kemiskinan yang diperkirakan dari aspek konsumsi (*consumption poverty rate*). Jikalau rumah tangga terkait tak mengalami pembatasan likuiditas yang bermakna bahwasanya konsumsi kini tak begitu dipengaruhi oleh pendapatan sekarang, sehingga jika tingkat pengangguran naik, maka bakal menjadikan naiknya kemiskinan berjangka panjang, tapi tak begitu memengaruhi secara jangka pendek.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

Menurut Todaro & Smith (2003) berpendapat bahwa pengangguran berkecenderungan untuk meningkat dari tahun ketahun. Perihal terkait jadi tantangan besar teruntuk Indonesia sebab indikator pembangunan yang sukses diantaranya ialah abilitas mengangkat kemiskinan serta meminimalisir pengangguran secara signifikan. Pada era globalisasi sekarang, persaingan pekerja begitu ketat khususnya sebab dibukanya perdagangan bebas yang mempermudah penawaran tenaga kerja asing lebih bermutu masuk ke dalam negeri.

Pengangguran disebut sebagai akar dari kemiskinan, jika tidak dapat dikendalikan dapat menghambat laju perekonomian, pengangguran mampu menjadikan masyarakat tak dapat memaksimalkan kesejahteraan karena biasanya naiknya pengangguran bakal sejalan dengan naiknya jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, pemerintah harus menciptakan suatu sistem yang dapat memberdayakan angkatan kerja, pemerintah dapat melakukan pelatihan terhadap angkatan kerja tersebut, sehingga harapannya kesempatan kerja bagi mereka juga akan meningkat. Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang bekerja maka pengangguran akan menurun begitu pula dengan tingkat kemiskinan (Trisnu & Sudiana, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia ialah satu proses pembenahan keahlian manusia guna merekonstruksi opsi serta kesempatan bagi penduduk. Satu diantara sejumlah acuan nnaiknya = kesejahteraan masyarakat ialah naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ialah indikator krusial guna memperhitungkan kesuksesan guna membangun mutu hidup penduduk. Selain itu, IPM juga mampu menetapkan tingkat pembangunan suatu wilayah atau negara (Todaro & Smith, 2003).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mmeuat 3 unsur utama, yakni angka harapan hidup, kelayakan standar hidup, dan tingkat pendidikan. Pembangunan yang baik dan terstruktur akan meningkatkan kualitas penduduk di suatu wilayah. Islami & Anis (2019) berpendapat bahwa peningkatan sumber daya manusia dapat dilaksanakan lewat pendidikan dan kesehatan. Pendidikan selaku proses budaya bakal bertumbuh dsertaan berkembang menjadi nilai-nilai dasar yang mesti dipunyai setiap manusia. Sementara itu, jika kesehatan masyarakat terjamin maka akan menurunkan hambatan dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga produktivitas juga akan naik. Dengan demikian, jika IPM di suatu wilayah meningkat, seharusnya tingkat kemiskinannya akan menurun.

Upah

Upah ialah sumber utama penghasilan seseorang, makanya upah mesti mampu mencukupi kebutuhan pekerja serta keluarganya secara harfiah. Sebagai imbalan terhadap tenaga serta pikiran yang disampaikan pekerja teruntuk pengusaha, maka pengusaha bakal membalasnya berbentuk upah. Upah ialah satu penerimaan selaku imbalan dari pengusaha teruntuk karyawannya untuk satu pekerjaan ataupun jasa yang sudah ataupun dilaksanakan pula dipaparkan ataupun dihargai dalam bentuk mata uang yang disetujui atas dasar persetujuan ataupun aturan perundangan, pula dibayarkan atas dasar perjanjian kerja diantara pengusaha dengan karyawannya, mencakup tunjangan, baik untuk karyawan terkait ataupun untuk keluarganya (Todaro & Smith, 2003).

Penetapan upah dalam pasar tenaga kerja sangatlah penting, karena harus ada suatu kesepakatan resmi yang dilindungi hukum guna mengesahkan besaran upah yang mesti dibayarkan perusahaan teruntuk pekerjanya. Undang-undang upah minimum menegaskan harga terendah tenaga kerja yang mesti dibayarkan (Mankiw, 2007).

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

Menurut Mike (2019), tujuan disahkannya upah minimum ialah memenuhi standar hidup minimum misalkan teruntuk kesehatan, efisiensi, serta kesejahteraan pekerja. Upah minimum yaitu upaya pengangkatan derajat penduduk berpendapatan rendah, khususnya pekerja miskin. Naiknya tingkat upah akan sejalan naiknya pendapatan tenaga kerja itu sendiri, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka dan terhindar dari kemiskinan.

METODE

Pada penelitian ini guna menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah terhadap kemiskinan pada Karesidenan Surabaya pada tahun 2015-2020 maka digunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel ialah gabungan antara data deret waktu *(time series)* serta data silang *(cross section).* Jenis data pada studi ini berupa data sekunder dimana data-data diambil di Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015-2020 meliputi 6 kabupaten/kota di Karesidenan Surabaya dan diolah menggunakan *Eviews 8* sebagai alat pengolahan data. Alat analisis yang dipakai pada studi ini ialah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik seperti berikut (Putri, 2013) :

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 logUNMP_1 it + \beta_2 logHDI_2 it + \beta_3 logWAGE_3 it + et \ldots\ldots (2)$$

Dimana :
Pov = Tingkat Kemiskinan
UNMP = *Unemployment*/Pengangguran
HDI = *Human Development Index* /Indeks Pembangunan Manusia
WAGE= Upah
β_0 = Konstanta
$\beta_1 \ldots \beta_3$= Koefisien regresi variabel independent
t = Tahun ke-t
i = Observasi ke-i
e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis regresi data panel. Pengujian data mengunakan uji Chow dan uji Hausman guna menetapkan model estimasi yang pas. Hasil estimasi regresi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Variabel	Koefisen Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	227.2413	106.4689	136.8952
UNMP	-0.130621	0.114996	0.098143
LOG(HDI)	-51.41705	-16.05420	-26.35201
LOG(WAGE)	0.350952	-1.886890	-0.936518
R^2	0.677999	0.989875	0.672524
Adjusted R^2	0.647812	0.986875	0.641823
Statistik *F*	22.45957	329.9696	21.90573
Prob. Statistik *F*	0.000000	0.000000	0.000000
Uji Spesifikasi Model			
(1) Uji Chow			

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

Cross-section F (5,27) = 166.339430; Prob.F (5,27) = 0,0000
(2) Uji Hausman

Cross-section random X^2 (3) = 2.157906; Prob.X^2 (3) = 0,5403

Sumber : Olah data dengan aplikasi *Eviews 8* (2022)

Pada uji diagnostik menunjukkan bahwasanya besaran probabilitas dari uji Chow untuk *F* (0,0000) < ∝ (0,05) dan uji Hausman untuk *F* (0,5403) > ∝ (0,10) menunjukkan model estimasi yang terpilih untuk digunakan yakni *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil estimasi dijelaskan bahwasanya variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada Karesidenan Surabaya tahun 2015-2020. Dimana besar koefisiennya adalah 0.098143 jika tingkat pengangguran naik 1% menjadikan tingkat kemiskinan menurun menjadi 0.098143%.

a. Uji Eksistensi Model (uji F)

Uji eksistensi model merupakan dari uji F. Hipotesis uji F terdiri dari modelnya yaitu $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, koefisien regresi bernilai nol sehingga pengangguran, indeks pembangunan manusia dan upah bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. $H_0 \neq \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0 \vee \beta_4 \neq 0$, jadi koefisien regresi tak bernilai nol sehingga secara bersama-sama pengangguran, indeks pembangunan manusia dan upah berpengaruh terhadap kemiskinan. H_0 akan ditolak jikalau nilai p, probabilitasnya, statistik *F* model terestimasi >∝; H_0 tidak ditolak jikalau nilai probabilitas statistik *F* < ∝ (Utomo, 2021).

Dari tabel 2, tampak nilai probabilitas ataupun signifikan empiris statistik *F* model terestimasi bernilai 0,0000 (< 0,10), menjadikan H_0 ditolak.

b. Interpretasi Koefisien Determinan

Koefisien determinan *(R-Squared* atau R^2) menjelaskan variasi antara variabel dependen dengan variabel independen guna menunjukkan hasil dari model terukur (Utomo, 2021). Dari tabel 2 tampak bahwa R^2 memiliki besaran senilai 0.672524 maknanya 67,25% variasi kemiskinan yang disertakan dengan variabel Pengangguran, indeks Pembangunan Manusia dan Upah. Sementara sisanya 32,75% yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tak termasuk pada model.

c. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji t dilakukan guna mengujikan pengaruh kesignifikanan variabel bebas secara sendiri-sendiri. H_0 akan diterima jikalau nilai p (*p value*), probabilitas, ataupun signifikasi empirik statistik t > α; H_0 akan ditolak jikalau nilai p (*p value*), probabilitas, ataupun signifikasi empirik statistik t > α (Utomo, 2021).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

variabel	t	sig.t	Kriteria	Kesimpulan
UNMP	1.698976	0.0990	< 0.10	Signifikan α = 0.10
HDI	-1.781144	0.0844	< 0.10	Signifikan α = 0.10
WAGE	-0.638371	0.5278	> 0.10	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah, (2022).

Pembahasan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10041

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Didasari perolehan estimasi regresi di tabel 2 menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Karesidenan Surabaya. Penelitiannya juga didukung dengan perolehan riset Aziz et al. (2016), Putra & Arka (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang positif serta berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini mampu dimaknai bahwasanya jikalau tingkat pengangguran semakin meningkat maka tingkat kemiskinan bakal naik. Sebaliknya apabila tingkat kemiskinan menurun, maka tingkat kemiskinan menjadi semakin rendah dikarenakan berkurangnya jumlah penduduk yang menganggur dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu penelitian Ihsan & Ikhsan (2018) bertentangan dengan penelitian sebelumnya karena tingkat pengangguran berpengaruh negatif serta tak signifikan terhadap kemiskinan penyebabnya ialah masyarakat mempunyai pekerjaan yang tidak tetap *(freelance)* masih memiliki pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan bertambahnya sarjana muda yang lulus dari universitas yang belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Output analisis regresi memaparkan bahwasanya indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, variabel indeks pembangunan manusia tidak terlalu berpengaruh terhadap kemiskinan di Karesidenan Surabaya. Perolehan risetnya didukung dengan studi Syaifullah & Malik (2017), Khaqiqi & Syaifuddin (2021), Susanti (2013) menyebutkan bahwasanya indeks pembangunan manusia memengaruhi kemiskinan secara negatif. Apabila nilai IPM meningkat di suatu kabupaten/kota maka tingkat kemiskinan menurun.

Pengaruh Upah Terhadap Kemiskinan

Didasari perolehan analisis regresi yang sudah dilaksanakan mengindikasikan bahwasanya upah tak berpengaruh terhadap kemiskinan di Karesidenan Surabaya. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Chairunnisa & Qintharah (2022), Gung et al. (2019) menjabarkan bahwasanya upah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga sebesar apapun upah di suatu kabupaten/kota tidak mempengaruhi kemiskinan dikarenakan apabila upah meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan tingkat pengangguran.

SIMPULAN

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui besarnya pengaruh pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta upah terhadap tingkat kemiskinan pada Karesidenan Surabaya tahun 2015-2020. Berdasarkan hasil regresi dengan mengaplikasikan model estimasi terpilih yaknu *Random Effect Model* (REM) dan hasil pembahasan antara variabel bebas terhadap variabel terikat mampu ditarik simpulan bahwasanya pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan sementara Indek Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, upah tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(4), 409–426.

Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi

Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, *12*(1), 29–48.

Bednar, D. J., & Reames, T. G. (2020). Recognition of and response to energy poverty in the United States. *Nature Energy*, *5*(6), 432–439. https://doi.org/10.1038/s41560-020-0582-0

Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *7*(1), 147–161. https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530

Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *6*(1), 102–117. https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199

Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *1*(1), 1–6. https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6

Ihsan, K., & Ikhsan. (2018). Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, *3*(3), 408–419.

Islami, Nadin and Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembaguan*, *1*(3), 939–948.

Khaqiqi, M. N., & Syaifuddin, T. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan upah terhadap kemiskinan. *Journal Of Islamic Economics and Finance*, *1*(2), 24–39. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jief/article/view/3916

Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *15*(2), 184. https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364

Pratama, Y. C. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinandi Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, *1*(2), 1–15. https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.18

Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, *7*(3), 416–444.

Putri, A. M. P. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Journal of Visual Languages & Computing*, *11*(3), 287–301.

Putri, I. C., Juliprijanto, W., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Karesidenan Kedu Tahun 2014-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, *1*, 338–347.

Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *8*(2), 227–248. https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450

Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, *6*(1), 111. https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546

Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat). *Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *12*(03), 1–11.

Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, *9*(1), 1. https://doi.org/10.24198/jmi.v9i1.9374

Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(1), 107–119. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download/6071/5525

Taufiq, N. (2017). Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan Terhadap Dinamika Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 7*, 1–14.

Utomo, Y. P. (2021). *Estimasi Model-Model Regresi dengan Eviews 9*.